BAB II

PROBLEM DEMOKRASI DI KAWASAN BALKAN BARAT

Dalam BAB ini akan mengupas tentang problem demokrasi di kawasan Balkan Barat selama dan pasca Perang Dingin. Bagian yang akan diulas dalam BAB ini adalah tentang sistem politik negara-negara di kawasan Balkan Barat dan problem politik di kawasan Balkan Barat. Bagian *pertama* yang akan diulas dalam BAB ini adalah tentang sistem politik negara-negara di kawasan Balkan Barat yaitu sistem politik otoriter dan sistem transisi menuju demokrasi. Kondisi sistem politik tersebut berada di masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. Bagian *kedua* dari BAB ini adalah problem politik yang ada di kawasan Balkan Barat yaitu (1) korupsi, (2) lemahnya penghormatan kepada hak minoritas, (3) kapasitas administrasi publik yang lemah, (4) tingkat sosial-ekonomi yang rendah, (5) adanya kejahatan yang terorganisir, (6) penekanan terhadap media massa. Bagian *ketiga* dari BAB ini adalah mengenai respon dan kebijakan Uni Eropa terhadap problem politik di kawasan Balkan Barat.

A. SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA DI KAWASAN BALKAN BARAT

1. SISTEM POLITIK OTORITER

Masuknya ideologi komunisme di kawasan Balkan Barat dimulai sejak akhir Perang Dunia 2 dimana pihak sekutu memenangi Perang Dunia 2.

Komunisme adalah sebuah ideologi yang mengutamakan masyarakat tanpa kelas. Salah satu negara yang berada di dalam pihak sekutu adalah Uni Soviet. Dengan kemenangan Uni Soviet yang dimana dia adalah salah satu negara besar dan adikuasa saat itu, tentu ide-ide komunisme sangat berkembang cepat dan pesat di dunia internasional. Ide-ide komunisme ini pada akhirnya mampu mempengaruhi negara-negara di kawasan Balkan Barat untuk mengadopsi ideologi komunisme. Cepatnya pengaruh ideologi komunisme di kawasan Balkan Barat juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis antara Uni Soviet dan Eropa Timur dengan Balkan Barat yang ada di Eropa Tenggara.

Di dalam periode era komunisme, ideologi Marxisme-Leninisme sangat kuat berakar di kawasan Balkan Barat. Terjadi indoktrinasi komunisme di kawasan Balkan Barat. Ada beberapa ciri mengenai sebuah negara yang mengadopsi ideologi komunisme. Ciri-ciri tersebut adalah (1) peran utama tunggal Partai Komunis, (2) sistem ekonomi komando yang diatur hanya oleh negara, (3) banyaknya batasan dan larangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, (4) terbatasnya kebebasan media massa, (5) terdapat polisi rahasia.

Dengan melihat penjelasan di atas, Yugoslavia dan Albania memang telah mengadopsi sistem ideologi komunis ala *Soviet-style*. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

1.1. Albania

Pada tahun 1944, ideologi komunisme masuk di Albania dimana telah dibentuk pemerintahan komunis di bawah Enver Hoxha.

Kemudian pada tahun 1961, Albania telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, karena Albania telah menganggap bahwa Kruschev adalah seorang revionis.

Pada tahun 1967, Albania telah menutup semua akses dan fasilitas peribadatan dan mendeklarasikan bahwa Albania adalah negara atheis.

Albania adalah negara yang masuk di dalam keanggotaan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah sebuah organisasi militer di bawah Uni Soviet yang berideologi komunis. Akan tetapi di tahun 1968, dia mengundurkan diri dari keanggotaannya.

Kemudian di tahun 1987, ketika ide *glasnost* dari Gorbachev muncul, banyak artikel-artikel di Albania yang mengkritik ide *glasnost* tersebut.

1.2. Yugoslavia

Yugoslavia memiliki arti Slavia Selatan, yang digambarkan sebagai sebuah negara dengan 2 aksara (Latin, Sirilik), 3 agama (Katolik, Ortodoks Timur, dan Islam), 4 bahasa (Serbo-Kroasia, Slovenia, Macedonia, dan Albania), dan 6 republik pendukung (Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro).[1]

[1] Lawrence T. Lorimer, 1993, *Negara dan Bangsa*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, hlm 96.

Dari kesemua ciri-ciri negara yang menganut sistem komunisme seperti yang telah disebutkan di atas, di Yugoslavia hanya terdapat satu partai yang berkuasa. Walaupun ada partai politik lain, tetapi mereka hanya sebuah "bayangan" yang sangat bergantung kepada partai komunis dalam percaturan demokrasi. Dalam pemilihan umum hanya ada seorang calon untuk setiap posisi. Tidak ada pilihan calon lain di dalam pemilihan umum. Sehingga hal ini membuat rakyat hanya memilih calon dari partai komunis yang berkuasa. Partai komunis tunggal yang ada di Yugoslavia yaitu bernama Liga Komunis Yugoslavia.

Pada tahun 1945, di Yugoslavia terbentuk pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Josip Broz Tito yang dimana dia adalah seorang pahlawan perang.[2] Walaupun dia adalah seorang diktator, tetapi dia tidak sekejam Stalin atau Ceausesce di Rumania. Nama lengkap negara Yugoslavia adalah Federal Demokratik Yugoslavia di tahun 1943-1946, dan berubah menjadi Republik Rakyat Federal Yugoslavia di tahun 1946-1992. Tito mampu mereformasi sistem negaranya yang sebelumnya berbentuk kerajaan menjadi Republik Federasi.

Yugoslavia adalah sebuah negara yang menganut ideologi komunis. Sistem pengadopsian komunis di Yugoslavia dapat dibilang sangat unik, karena dia tidak sepenuhnya mengadopsi sistem komunis ala *Soviet-style*. Yugoslavia mampu me-*maintance independence*

[2] *Ibid.*, hlm 17.

negaranya sendiri dari pengaruh Uni Soviet. Hal itu dapat dilihat dimana Yugoslavia tidak menjadi anggota Pakta Warsawa maupun NATO. Yugoslavia adalah sebuah negara komunis yang masuk dalam Gerakan Non-Blok. Dalam hal ini terlihat bahwa dia tidak berpihak ke dalam poros Amerika Serikat dan tidak tergabung ke dalam poros Uni Soviet. Yugoslavia adalah sebuah negara netral yang tidak memihak siapapun. Sehingga Yugoslavia mampu menampilkan identitas komunis dan keunikan negaranya di dunia internasional.

Sistem yang dikembangkan oleh Tito didasarkan pada tiga prinsip pokok: (1) *self-management*, yang ditandai dngan mekanisme ekonomi semi bebas dan mengandalkan serikat-serikat pekerja, (2) *brotherhood and unity*, persatuan dan persaudaraan merupakan doktrin pengembangan harmoni dalam kehidupan antaretnis di bawah kepemimpinan satu partai, dan (3) prinsip non-blok dalam politik luar negeri, yang berarti Yugoslavia netral terkait persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.[3]

Prinsip *brotherhood and unity* dilakukan oleh Tito karena Yugoslavia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak etnis. Sehingga prinsip tersebut harus dijalankan untuk mengurangi konflik antaretnis. Tito berusaha mengkolaborasikan kebudayaan-kebudayaan etnis, yang kemudian hasil dari kolaborasi tersebut dijadikan sebuah

[3] http://eprints.uny.ac.id/21749/2/3.BAB%20I%20.pdf diakses pada 19 Desember 2016 pukul 19.24 WIB.

kebudayaan nasional Yugoslavia tanpa mematikan kebudayaan asli lokal.

Tito menerapkan sebuah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi swakelola.[4] Sistem tersebut dinamakan *self-management socialism.* Bahwa perusahaan diberi wewenang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri. Organisasi-organisasi swakelola didirikan di kalangan petani dan buruh. Harga barang ditetapkan berdasarkan tolok ukur ekonomi, bukan berdasarkan ketetapan pusat. Subsidi sebagian dicabut. Republik-republik yang lebih makmur diwajibkan membantu republik yang lebih miskin.[5] Selanjutnya pada tahun 1965, Yugoslavia memperkenalkan reformasi ekonomi jangka-panjang dan swamanajemen pekerja. Itulah sistem politik yang berjalan pada era komunisme di Albania dan Yugoslavia.

2. TRANSISI MENUJU DEMOKRASI

Akhir dari ideologi komunisme di kawasan Balkan Barat dipicu oleh runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990-an, dimana di tahun tersebut dimulailah demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Akan tetapi dua tahun sebelum runtuhnya Uni Soviet, ide untuk meninggalkan ideologi komunisme mulai bermunculan di kawasan Balkan Barat. Pasca komunisme, negara-negara di

[4] http://eprints.uny.ac.id/21749/3/4.BAB%20II%20.pdf diakses pada 2 Desember 2016 pukul 20.53 WIB.

[5] Tjipta Lesmana, 1992, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Jakarta: Erwin-Rika Press, hlm 203 dalam http://eprints.uny.ac.id/21749/3/4.BAB%20II%20.pdf, hlm 45.

kawasan Balkan Barat berada di dalam gejolak bergulat melawan kekalutan politik, ekonomi, dan sosial.

Pasca runtuhnya komunisme, Yugoslavia adalah negara yang mengalami gejolak dan kemelut politik yang sangat parah. Yugoslavia adalah sebuah negara yang terdiri dari 7 republik yaitu Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kroasia, Kosovo, Macedonia, dan Montenegro yang beribu kota di Beograd. Ketika Uni Soviet runtuh, negara-negara anggota Uni Soviet saling melepaskan diri. Hal yang sama juga terjadi di Yugoslavia. Yugoslavia terpecah menjadi tujuh negara. Proses transisi demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari (1) sistem politik yang tidak terpusat oleh negara. Rakyat juga memiliki hak untuk ikut dalam sistem politik, misalnya dilakukan dengan mengkritik kebijakan pemerintah; (2) sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi pasar-bebas; (3) kebebasan media massa; (4) adanya kebebasan bagi rakyat untuk melakukan sesuatu, misalnya berpendapat, membentuk organisasi, berdemo untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

2.1. Albania

Kemudian pada tahun 1990, terjadi demonstrasi anti-Stalinis di Albania di kota Shoder. Demonstrasi juga terjadi di Tirana dan kota-kota lain. Padahal demonstrasi ini tidak pernah ada selama 46 tahun silam. Presiden Ramiz Alia mengumumkan suatu program demokratisasi yang mengijinkan petani mengolah lahan pribadi,

membuat perjalanan ke Barat menjadi lebih mudah, dan mengijinkan rakyat Albania beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.[6] Pemerintah Albania telah menyetujui sebuah reformasi ekonomi, hukum, dan menghapus propaganda agama.

Kemudian di tahun 1991, terjadi demonstrasi antikomunis yang berlangsung di Tirana. Albania melakukan pemilihan umum multipartai untuk pertama kalinya. Ini adalah bentuk terjadinya transisi demokratisasi di Albania.

Pada tahun 1992, Partai Demokrasi yang notabenya menjadi partai oposisi menang telak dalam pemilihan umum. Sali Berisha seorang dokter bedah jantung menjadi presiden pasca komunis Albania untuk pertama kalinya.

Adapun ke-tujuh negara *ex*-Yugoslavia tersebut yang berada di masa transisi menuju demokrasi adalah sebagai berikut :

2.2. Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina adalah negara yang merdeka tahun 1992 yang dipimpin oleh Alija Izetbegovic. Ibu kota dari Bosnia-Herzegovina adalah Sarajevo. Bosnia-Herzegovina terdiri dari 44% etnis Slavia yang beragama Islam, 31% orang Serbia yang beragama Kristen Ortodoks Timur, dan sisanya adalah orang Kroasia yang beragam Katolik Roma.

[6] Lawrence T. Lorimer, 1993, *Negara dan Bangsa*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, hlm 51.

Pasca kemerdekaannya di tahun 1992, negara ini mengalami konflik genosida dengan Serbia. Terjadi pembantaian Muslim Bosnia oleh Serbia yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Konflik ini diselesaikan dengan Perjanjian Dayton pada tahun 1995.

Dalam masa transisi menuju demokrasi yaitu di masa pasca konflik pada tahun 1996, pemerintahan Bosnia-Herzegovina berusaha tidak hanya mengedepankan etnis tertentu, tetapi berusaha mengedepankan keseimbangan antaretnis yaitu antara etnis Serbia, Bosnia (muslim), dan Kroasia.[7] Hal itu terlihat di dalam pemilihan pejabat negara. Dalam hal ini isu etnis menjadi prioritas. Parpol mulai tumbuh di Bosnia-Herzegovina, walaupun belum bisa merepresentasikan fungsinya. Partai yang tumbuh tidak berfokus dalam membangun ideologi etnis, tetapi berfokus pada kesehatan dan pendidikan.

Kompetisi politik di negara ini diperlihatkan melalui pemilu. Pemilu yang diselenggarakan harus menyeimbangkan etnis. Dalam menunujukkan *civil society*, muncullah *youth advisory group*, dimana dia berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam isu kepemudaan.

[7] Affairs, N. D, 2009, *Bosnia-Herzegovina Democracy Assessment Report,* National Democratic Institute for International Affairs, hlm 4.

2.3. Kosovo

Republik terakhir yang merdeka dari Yugoslavia adalah Kosovo. Kosovo secara resmi mendeklarasikan kemerdekaanya pada tahun 2008 dari Serbia, walaupun sebenarnya dia sudah mendeklarasikan kemerdekannya pada tahun 1992, tetapi hanya Albania yang mengakui kemerdekannya.[8] Kosovo adalah sebagai salah satu provinsi yang ada di Serbia. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Albania. Dia adalah negara termuda dibandingkan dengan *ex*-negara Yugoslavia. Walaupun seperti itu, dia adalah sebuah negara yang mencoba mengadopsi sistem demokrasi secara utuh. Contoh parpol yang muncul di masa transisi demokrasi adalah *Democratic Party of Kosovo, the Democratic League of Kosovo, and the Alliance for the future of Kosovo*.[9]

2.4. Kroasia

Kroasia mendeklarasikan kemerdekaanya secara resmi dari Yugoslavia pada tahun 1991 dan beribu kota di Zagreb. Pasca kemerdekaan Kroasia, tingkat nasionalisme di Kroasia sangat meningkat tajam. Nasionalisme yang tumbuh di Kroasia dipimpin oleh ide-ide liberalisme, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, ekonomi pasar,

[8] http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-4445-bab1.pdf diakses pada 2 Desember 2016 pukul 20.19 WIB.

[9] Anastasakis, O, 2013-2014, "Election Consolidation in the Post-Communist Balkans: Progress and Obstacles", *Caucasus International University of Oxford, Vol 3, No 4, Winter*, hlm 19.

dan kebudayaan Eropa Barat.[10] Pemilu multipartai yang bebas mulai diselenggarakan di Kroasia pasca kemerdekaan Kroasia. Pemilihan umum di Kroasia untuk pertama kalinya dimenangkan oleh Uni Demokratik Kroasia Nasional (*Croatian Democratic Union Party* (HDZ)) yang bersayap kanan yaitu Presiden Franjo Tudjman. Partai ini sangat mendominasi Kroasia dalam masa menuju transisi ke demokrasi.

Dalam sistem perekonomiannya di awal kemerdekaanya, mulai muncul ide mengenai privatisasi dan mengubah regulasi ke arah sistem ekonomi pasar-bebas. Ide mengenai privatisasi ini dilakukan untuk mengurangi inflasi yang tinggi di Kroasia.

2.5. Macedonia

Macedonia mendeklarasikan kemerdekannya dari Yugoslavia pada tahun 1991. Ibu kota dari Macedonia adalah Skopje. Pasca mendeklarasikan kemerdekaannya, terdapat beberapa perang etnis di Macedonia. Contohnya antara etnis Macedonia dan Albania. Etnis Albania menjadi penduduk terbesar kedua di Macedonia.

Pada pemilu multipartai yang pertama kalinya di Macedonia, partai VMRO-DPMNE *(International Macedonian Revolutionary Organisation-Democratic Party of Macedonian National Unity)*

[10] Pero Maldini, 2012, "Nationalism in Croatian Transition to Democracy: Between Structural Conditionality and the Impact of Legacy of History and Political Culture", *CONTEMPORARY issues, Vol. 5, No. 1* , hlm 16.

memenangkan 38 kursi dari 120 kursi di parlemen.[11] Terdapat 16 partai politik yang mengikuti pemilu saat itu.

2.6. Montenegro

Montenegro juga menjadi negara pecahan dari Yugoslavia. Sebelumnya di masa Perang Dunia I, Montenegro dianeksasi oleh Serbia sampai tahun 1918. Di masa Perang Dunia II, dia menjadi bagian dari Yugoslavia. Dia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai pemerintahan yang baru pada tahun 2006, karena sebelumnya, negara Montenegro ini pernah bernama Serbia-Montenegro sampai tahun 2002. Ibu kota dari Montenegro adalah Podgorica.

Dalam masa awal transisi demokrasi pasca kemerdekaannya yaitu di tahun 1990-an, forum demokrasi mulai dibangun, yang itu ditunjukkan dengan adanya sistem multipartai.[12] Sistem pemilu multipartai juga mulai diselenggarakan. Kemudian muncul beberapa institusi seperti *constitutional court*, *parliament*, kementrian luar negeri, dan bank sentral. Dalam masa pasca kemerdekannya, juga terjadi beberapa perang sipil di Montenegro. Di masa transisi menuju demokrasi, muncul beberapa partai politik di Montenegro. Contoh partai politik tersebut adalah *Democratic Party of Socialists* (DPS) (1991) dan *The Social Democratic Party* (SDP) (1993). Partai ini

[11] Maleska, M, 2013, Multiethnic Democracy in Macedonia: Political Analysis and Emerging Scenarios, *Journal of Politics : New Balkan Politics, Issue 13* , hlm 4.

[12] Katni´c, I. L, 2016, The Making of a State : Transition in Montenegro. *Cato Journal, Vol. 36, No. 3*, hlm 2.

mampu menggeser kekuasaan partai sosialis Montenegro yaitu *Socialist People's Party* (SNP).

Kondisi perekonomian Montenegro pasca lepas dari Yugoslavia, dia mendapatkan sanksi ekonomi dari PBB. Ini menyebabkan GDP. Montenegro turun secara terus-menerus. 89% di tahun 1990, 70% di tahun 1991, 61% di tahun 1992, 39% di tahun 1993.[13] Kemudian, di tahun 1995 dimulailah reformasi ekonomi di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Dengan kebijakan reformasi ekonomi tersebut, dimulailah privatisasi dan *ownership rights* di Montenegro yang diprakarsai oleh Veselin Vukotic'.

2.7. Serbia

Serbia merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1990. Di awal-awal transisi, Serbia dipimpin oleh seorang semi-diktator yaitu Slobodan Milosevic. Dalam masa transisi tersebut, Serbia melakukan pemilihan umum multipartai pertama kalinya yaitu pada tanggal 9 Desember 1990 yang dimenangkan oleh *Socialist Party of Serbia* (SPS).

Kondisi perekonomian Serbia di masa awal-awal transisi demokrasi adalah Serbia mendapatkan sanksi ekonomi dari PBB di tahun 1992. Serbia mendapatkan embargo ekspor dan impor, menurunnya produksi industri, adanya pasar gelap, dan hiperinflasi.[14]

---

[13] *Ibid.,* hlm 6.

[14] Stratulat, C, 2014, *Issue Paper No 77 EU Integration and Party Politics in the Balkans,* Europe: European Policy Center.

B. PROBLEM POLITIK DI KAWASAN BALKAN BARAT

Balkan Barat adalah sebuah kawasan yang minim *responsibility*, *responsiveness*, transparansi, dan politik internal. Minimnya kebijakan mengenai multikultural menjadi sebuah hambatan bagi terciptanya stabilitas, keamanan, dan demokrasi di tahun 1990an. Hampir di semua negara di kawasan Balkan Barat telah mengalami periode transisi dan konflik etnis yang mengakibatkan turunnya standar hidup dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

1. Korupsi

Korupsi adalah menjadi hambatan yang paling besar di kawasan Balkan Barat dalam membangun sebuah negara yang kuat yang berideologi demokrasi, terutama di Kroasia, Macedonia, dan Serbia. Dapat dikatakan bahwa korupsi menjadi "*business culture*" di kawasan Balkan Barat.[15] Korupsi yang ada di kawasan Balkan Barat juga didukung dengan adanya sistem komunis di negara tersebut. Tentu saja, budaya korupsi yang ada di kawasan Balkan Barat menjadi penghambat untuk bertransisi menjadi negara yang demokratis. GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*) mengatakan bahwa korupsi menjadi faktor merugikan yang paling signifikan dalam menolak prinsip dan institusi dasar dalam membangun dan mendukung demokrasi.[16] Kemiskinan dan kelaparan yang ada di kawasan Balkan Barat disebabkan oleh para pemimpin yang melakukan korupsi. Dengan adanya korupsi yang ada di

[15] Komsuoglu, A. G. *Corruption, Democratization, and State-Building in the Balkan Barats*. Dokuz Eylul University, Department of International Relations and Istanbul University, Department of International Relations, hlm 2.

[16] *Ibid*.

kawasan Balkan Barat membuat sebagian besar masyarakat disana tidak percaya kepada pemerintah.

Di Macedonia, pemerintahan dalam negeri telah membuat legislasi mengenai korupsi, tetapi terjadi *gap* antara legislasi tersebut dengan implementasinya. Kemudian di Bosnia-Herzegovina dan Serbia sudah terdapat sebuah *legal framework*, tetapi keinginan politik untuk meningkatkan kapasitas institusi mengenai isu korupsi masih sangat lemah. Di Montenegro, keinginan politik untuk menurunkan tingkat korupsi di negaranya adalah lebih baik jika dibandingkan di negara-negara kawasan Balkan Barat lainnya.

Grafik 1: ***Corruption Perception Index Results for Western Balkans in*** **2000-2011**

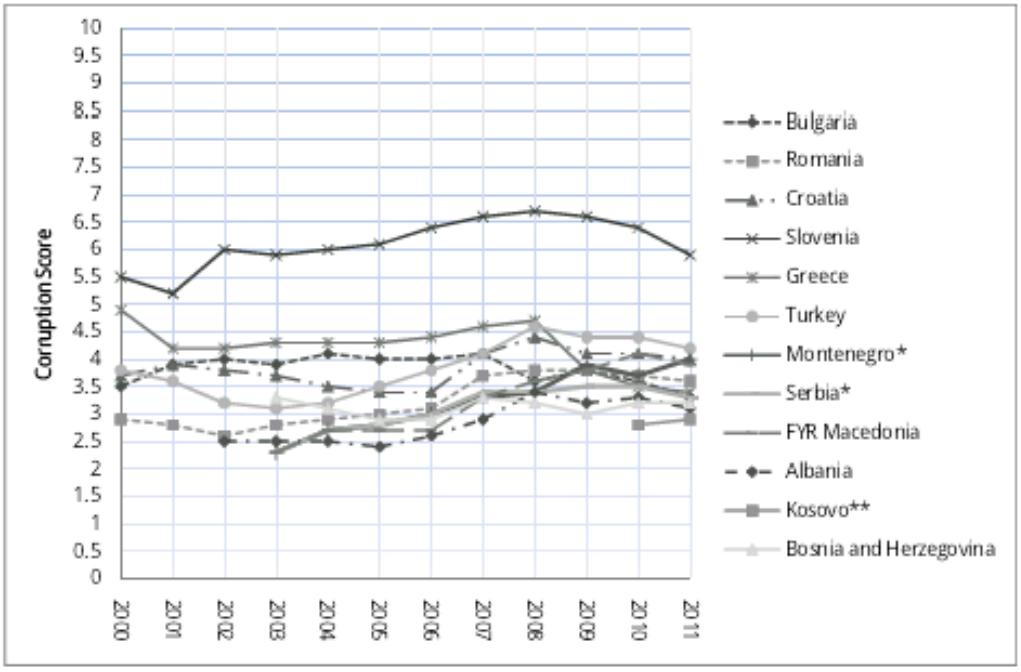

Catatan: *Index score range* dari 0 (terendah-tingkat korupsi paling tinggi) sampai 10 (tertinggi-tingkat korupsi paling rendah)

Sumber : www.worldvaluesurvey.org dalam Aysegul Komsuoglu. *Corruption, Democratization, and State-Building in the Balkan Barats*. Dokuz Eylul University, Department of International Relations and Istanbul University, Department of International Relations, hlm 22.

Grafik 2: ***Ranking and Scores of the Western Balkans Countries in the Corruption Index in*** **2012-2013**

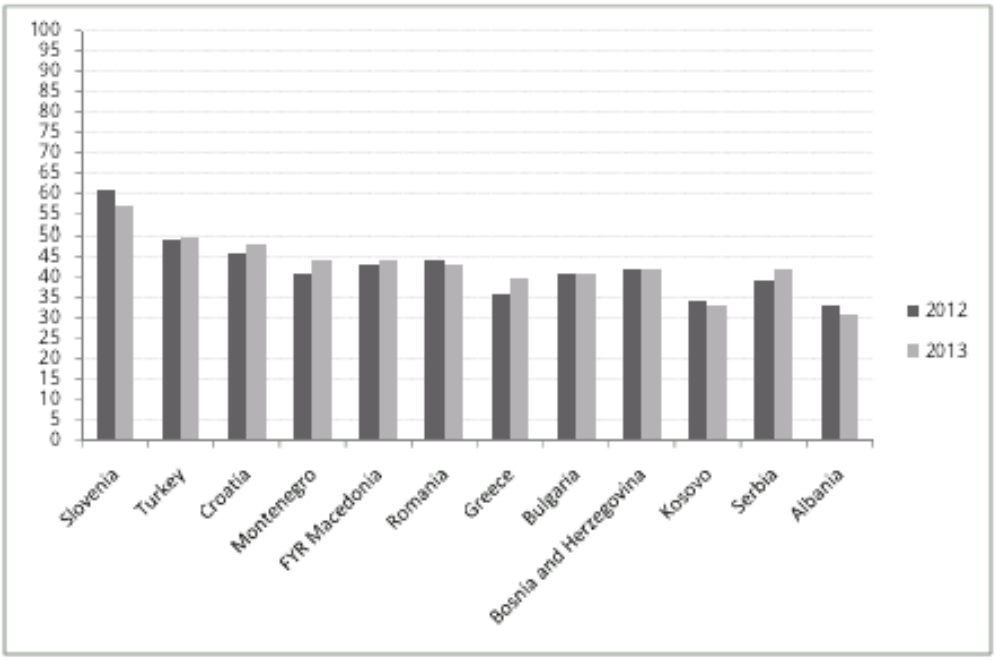

Catatan : *Index score range* dari 0 (terendah-tingkat korupsi paling tinggi) sampai 10 (tertinggi-tingkat korupsi paling rendah)

Sumber : http://www.transparency.org. dalam Aysegul Komsuoglu. *Corruption, Democratization, and State-Building in the Balkan Barats*. Dokuz Eylul University, Department of International Relations and Istanbul University, Department of International Relations, hlm 23.

Tabel 1: Persepsi Publik terhadap Korupsi di Kawasan Balkan Barat

	Political parties	Parliament/ legislature	Police	Public officials	Judiciary	Military	Education system
Bosnia-Herzegovina	4.1	3.9	3.5	3.8	3.5	2.4	3.6
Croatia	4.0	4.0	3.7	3.8	4.1	2.7	3.4
Kosovo	4.2	3.9	2.4	3.2	4.1	1.3	2.4
FYR Macedonia	3.7	3.5	3.3	3.6	3.9	2.1	3.4
Serbia	4.2	3.8	3.6	3.8	3.9	2.7	3.6

Source: Global Corruption Barometer, 2010

2. Lemahnya Penghormatan terhadap Hak Minoritas

Lemahnya penghormatan terhadap hak minoritas menimbulkan terjadinya perang sipil di kawasan Balkan Barat, misalnya seperti di Kosovo. Etnis minoritas di kawasan Balkan Barat juga dapat dilihat di Macedonia dengan etnis Turki dan Albania-nya. Lemahnya penghormatan terhadap kaum minoritas dapat dilihat di negara ini. Terdapat hukum yang mengatakan bahwa untuk menjadi penduduk tetap Macedonia, dia sudah tinggal di Macedonia paling tidak selama 15 tahun. Hal ini membuat 150.000 terutama kaum minoritas Albania gagal untuk mengikuti persyaratan ini. Perdamaian dan stabilitas politik di kawasan Balkan Barat sangat bergantung dengan bagaimana negara tersebut men-*treatment* hak-hak minoritas.[17] Isu mengenai perlindungan terhadap hak-hak minoritas menjadi prioritas utama di era pasca Perang Dingin. Hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi *progress* demokratisasi di dunia internasional.

[17] Akgün, D. B, June - July 2001, Democratisation and Minority Rights In The Post-Communist Balkan Barat States, *Journal of International Affairs, Volume VI - Number 2*, hlm 1.

Balkan Barat adalah sebuah kawasan yang memiliki banyak etnis. Masyarakat di kawasan Balkan Barat sangat bersifat heterogen. Tentu dengan banyaknya macam etnis menimbulkan berbagai macam agenda politik dari masing-masing etnis. Wajar jika hal ini dapat memicu terjadinya perang sipil. Perang sipil juga terjadi karena masing-masing etnis saling mengedepankan "*ethnic nationalism*" bukan mengedepankan "*civic nationalism*". Akan tetapi, jika negara-negara di kawasan Balkan Barat ingin bertransisi menjadi negara yang demokratis, maka mereka harus mendirikan sebuah masyarakat yang sangat menghormati HAM dan melakukan tradisi serta kebudayaan politik demokrasi di dalam *civil society*. Tradisi dan kebudayaan politik mereka saat itu penuh dengan ketidaktoleransi antarmasyarakat dan antaretnis.

3. Kapasitas Administrasi Publik yang Lemah

Rata-rata problem politik ini terjadi hampir di semua negara di kawasan Balkan Barat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi negara tersebut yang baru merdeka yang dipenuhi dengan ketidakstabilan politik dan sumber daya manusia yang lemah. Administrasi atau yang bisa disebut dengan birokrasi di kawasan Balkan Barat berjalan dengan lamban, berbelit-belit, dan tidak efektif serta tidak efisien. Perkembangan teknologi dalam menopang keefektifan administrasi publik disana tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini juga disebabkan oleh SDM yang tidak berkualitas. Sehingga membuat sebuah kultur administrasi publik yang lemah di

kawasan Balkan Barat. Di Montenegro misalnya, kapasitas administrasi publik menjadi kabur karena tidak ada perbedaan antara kekuasaan *rulling party* dan *state*.

4. Tingkat Sosial-Ekonomi yang Rendah

Di kawasan Balkan Barat, tingkat perekonomian memang terbilang sangat lemah. Misalnya seperti tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2: Tingkat Pengangguran di Kawasan Balkan Barat

No	Negara	Presentase
1.	Albania	18%
2.	Bosnia-Herzegovina	27.5%
3.	Kosovo	30%
4.	Macedonia	28%
5.	Montenegro	19%
6.	Serbia	17.6%

Sumber : Regional Cooperation Council. *Balkan Barometer 2015 Public Opinion Survey*, Sarajevo, 2015.

Sektor swasta di kawasan Balkan Barat juga tidak bisa berkembang. Malahan, banyak sekali sektor-sektor yang dikuasai oleh negara. GDP di Balkan Barat juga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan hasil produksi industri mengalami penurunan, maka mereka tidak dapat melakukan ekspor. Dengan adanya hal tersebut maka, tingkat kemiskinan dan standar hidup di kawasan Balkan Barat sangat rendah.

Selain hal di atas, dari segi sosial terjadi masifnya *brain dain*. Orang-orang pintar dan berilmu tinggi lebih tertarik untuk pergi bekerja ke luar negeri. Di Bosnia-Herzegovina misalnya, 58% masyarakatnya lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di negaranya. Tentunya hal ini membuat SDM, pendidikan, inovasi penelitian dan perkembangan teknologi di kawasan Balkan Barat menjadi rendah.

5. Adanya Kejahatan yang Terorganisir

Masalah kejahatan yang terorganisir hampir terjadi di setiap negara di kawasan Balkan Barat. *Skope* kejahatan yang terorganisir yang terdapat di kawasan Balkan Barat adalah *trafficking drugs; trafficking human beings; smuggling drugs, cigarettes, and weapons*. *The Council of Europe's* 2004 *Situation Report* mengatakan bahwa terjadi lebih dari 2500 kasus kejahatan yang terorganisir yang terjadi di kawasan Balkan Barat. Di Albania misalnya, terjadi peningkatan sebesar 50% kejahatan yang terorganisir dari 2003 ke 2004.[18]

UNODC 2010 *Report* melaporkan bahwa 90% heroin dunia disuplai oleh Afghanistan dan kokain dari Afrika Selatan, dan sebanyak 37%nya melewati kawasan Balkan Barat. Hal ini sering disebut dengan *Balkan Route*. Kawasan Balkan Barat dijadikan transit dan *storage* dari *drugs* yang akan dikirim ke negara di Eropa. Maka hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan narkotika di kawasan Balkan Barat. Berdasarkan *Council's*

[18] Balfour, Rosa and Corina Stratulat.2011.*EPc Issue Paper No 66: The Democratic Transformation of the Balkans.*Europe: European Policy Center, hlm 28.

Regional Report 2009 melaporkan bahwa penggunaan narkotika tertinggi terdapat di Kosovo, Montenegro, dan Macedonia.

Yang diperjualbelikan dalam *trafficking human beings* adalah para wanita untuk eksploitasi seksual, laki-laki yang dijadikan *illegal labour markets*, dan anak-anak yang diculik untuk dijadikan pengemis. Akan tetapi *trafficking human beings* ini banyak terjadi pada wanita dan anak-anak di usia 18-24 tahun. Keuntungan setiap tahunnya yang dihasilkan dari *trafficking* manusia adalah sebesar 32 bilion US dollars.

6. Tekanan terhadap Kebebasan Media Massa

Masalah yang dihadapi oleh media massa di kawasan Balkan Barat adalah seperti tekanan politik dan ekonomi pada media, kriminalisasi hukum terhadap kesalahan jurnalistik, kejahatan terhadap jurnalistik, dan kepemilikan media. Para pemimpin negara di kawasan Balkan Barat berusaha untuk menekan media agar memberitakan sesuatu yang baik untuk disiarkan kepada masyarakat. Di Kroasia misalnya jurnalis Zeljko Peratovic menulis mengenai kejahatan perang tahun 1990-an pada tahun 2009, satu tahun kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintahan Kroasia.[19] Contoh lainnya adalah *Westdeutsche Allgemeine Zeitung* sebuah investor asing Jerman di bidang media yang memiliki beberapa media di Kroasia dan Serbia telah memonopoli dalam mengontrol tiga jenis koran harian utama, dengan pasar yang besar (hampir 90%) di Macedonia.

[19] *Ibid.,* hlm 37.

C. RESPON DAN KEBIJAKAN UNI EROPA

Dalam merespon *problem-problem* demokrasi yang dihadapi oleh kawasan Balkan Barat, Uni Eropa berusaha untuk membantu kawasan Balkan Barat dalam mendemokratisasikan negaranya masing-masing. Dalam hal ini, Uni Eropa diwakili dan dipresentasikan oleh Komisi Eropa (*European Commission*). Komisi Eropa adalah aktor Uni Eropa yang berperan dalam membantu mendemokratisasikan negara-negara di kawasan Balkan Barat. Komisi Eropa dengan persetujuan Parlemen Eropa dan Dewan Menteri/ Dewan Uni Eropa, memiliki hak dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi kawasan Balkan Barat dalam mendemokratisasikan negaranya.

Di dalam Uni Eropa ada beberapa institusi yang melembagai di dalamnya. Institusi-institusi tersebut adalah *European Council* (Presiden *plus* kepala pemerintahan/ negara dari negara anggota serta Presiden Komisi Eropa), *European Parliament, Council of the European Union* (*member states representative* dan *Union Minister for Foreign Affairs*), *Commission, Court of Justice of the European Union, European Central Bank,* dan *Court of Auditors*. Dalam hal ini yang memiliki peran terhadap upaya demokratisasi di Balkan Barat adalah Komisi Eropa.

The European Commission (biasanya hanya disebut *the Commission*) atau Komisi Eropa adalah *the driving force* dalam membangun Eropa. Di dalam struktur kelembagaan Uni Eropa, Komisi Eropa berperan sebagai lembaga eksekutif. Hanya Komisi yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan proposal (RUU). Tidak ada badan Uni Eropa lain maupun negara anggota yang berhak

untuk mengajukan proposal selain Komisi. Bahkan jika proposal yang diajukan ditolak oleh Dewan Uni Eropa (dan Parlemen Eropa melalui *co-decision procedure*), maka hanya Komisi pula yang berhak merubahnya (kecuali ditolak secara *unanimity*).

Komisi juga mempunyai peran sebagai *the guardian of the treaties and of the "acquis communautaire"* (seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa). Dalam kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa dan karena itu Komisi memiliki kewenangan investigasi. Komisi juga merupakan badan eksekutif dan karena itu memiliki peran administratif untuk memastikan tercapainya semua tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat Uni Eropa. Komisi juga memainkan peran representasi, yang mewakili Uni Eropa di berbagai organisasi internasional maupun dalam berhubungan dengan berbagai negara.

Berdasarkan *Article* 17 *of the Treaty on European Union*, Komisi Eropa memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas di dalam Uni Eropa. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah : (1) mengembangkan strategi-strategi dalam jangka menengah, (2) membuat *draft legislation* dan berperan di dalam proses legislasi, (3) merepresentasikan Uni Eropa di dalam negosiasi aspek perdagangan, (4) membuat peraturan dan regulasi (ex: *competition policy*), (5) menyusun *budget* di Uni Eropa, (6) *monitoring* implementasi dari *treaty* dan legislasi. Komisi Eropa memiliki hak dan tanggung jawab dalam *executive power, legislative initiative,* dan *enforcement*.

Komisi Eropa saat ini terdiri dari 28 orang Komisioner yang dipimpin oleh seorang Presiden. Kantor pusat Komisi Eropa berada di Brussels, Belgia. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki dan mengajukan satu wakil di Komisi Eropa. Sesuai Traktat Maastricht 1992, masa jabatan para Komisioner adalah lima tahun yang dipilih oleh Parlemen Eropa, kecuali ada upaya untuk mengubahnya (*censure motion*) dari Parlemen Eropa. Melalui proses konsultasi dengan Parlemen Eropa, pemerintah masing-masing negara anggota dengan suara bulat mengajukan calon Presiden Komisi Eropa beserta calon-calon Komisioner yang akan ditunjuk. Presiden Komisi diangkat dengan kesepakatan bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa saat ini dijabat oleh Jean-Claude Junker dari Luxemburg, yang menjabat dari tahun 2014-2019. Sebelum Jean-Claude Junker, Presiden Komisi Uni Eropa secara berturut-turut adalah Jacques Delor, Jacques Santer, Romano Prodi, dan Jose Manuel Barroso.

Berdasarkan Artikel 55 Traktat Roma 1957, salah satu wewenang Komisi Eropa adalah membuat usulan kebijakan kepada Dewan Menteri mengenai berbagai kebijakan Uni Eropa di bidang pertanian, industri dan pasar internal, riset, energi, lingkungan, masalah sosial dan regional, serta perdagangan eksternal.

Di dalam struktur Komisi Eropa, terdiri dari *college of commissioners of* 28 *members*, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Setiap komisioner memimpin satu bidang tertentu dan memiliki tanggung jawab tertentu di dalam Uni Eropa. Misalnya Cecilia Malmstrom yang memimpin di bidang *trade*,

Johannes Hahn yang memimpin di bidang *European Neighbourhood Policy and Enlargement Negosiations*, Neven Mimica yang memimpin di bidang *international cooperation and development*, Miguel Arias Canete yang memimpin di bidang *climate action and energy*, dll. Dalam hal ini, bagian Komisi Eropa yang berperan dalam demokratisasi di kawasan Balkan Barat adalah *European Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negosiations*.

European Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negosiations memiliki tugas dan beberapa tanggung jawab yaitu : (1) Memperkuat dan memperdalam hubungan dengan negara tetangga Uni Eropa baik di selatan maupun timur, di dalam bingkai kepentingan Uni Eropa maupun kepentingan negara-negara tersebut. (2) Mempromosikan stabilitas di batas-batas Eropa dan membantu negara tetangga dalam mengembangkan dan meningkatkan stabilitas institusi demokrasi untuk menjadi lebih *prosperous* di bawah kebijakan *European Neighbourhood Policy*. (3) Mengkoordinasikan tawaran-tawaran Uni Eropa ke dalam kerjasama yang lebih dekat di beberapa bidang seperti pedagangan, mobilitas, energi, dan edukasi untuk menciptakan *tailor-made partnerships* dalam mengembangkan hubungan dengan negara tetangga. (4) Melanjutkan *ongoing European Union membership negotiations* dan membantu menyiapkan negara-negara tersebut ke dalam keanggotaan dalam menghadapi tantangan di masa depan. (5) Mendukung *pre-accession countries* dalam mengimplementasikan demokrasi, reformasi ekonomi, menegakkan hukum, memperkuat *economis governance and competitiveness*,

mengembangkan *well-functioning* administrasi publik, dan membangun "jembatan" dengan negara-negara tetangga.

Adapun nama-nama *Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negosiations* adalah :

	Name	Country	Period	Commission
1	Günter Verheugen	Germany	1999–2004	Prodi Commission
2	Janez Potočnik	Slovenia	2004	Prodi Commission
3	Olli Rehn	Finland	2004–2010	Barroso Commission I
4	Štefan Füle	Czech Republic	2010-2014	Barroso Commission II
5	Johannes Hahn	Austria	2014-onwards	Juncker Commission

Gambar 2: *European Union Legislative Triangle*

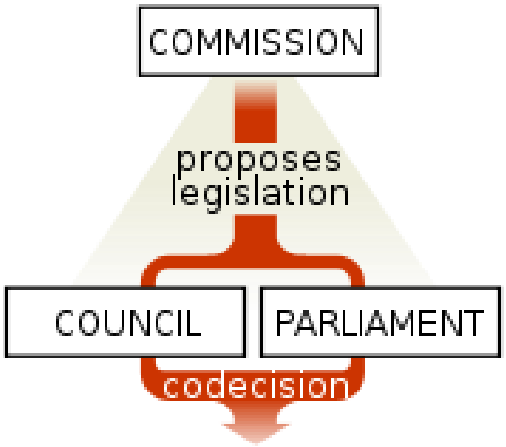

Skema 1: ***Decision-Making → the Ordinary Legislative Procedure***

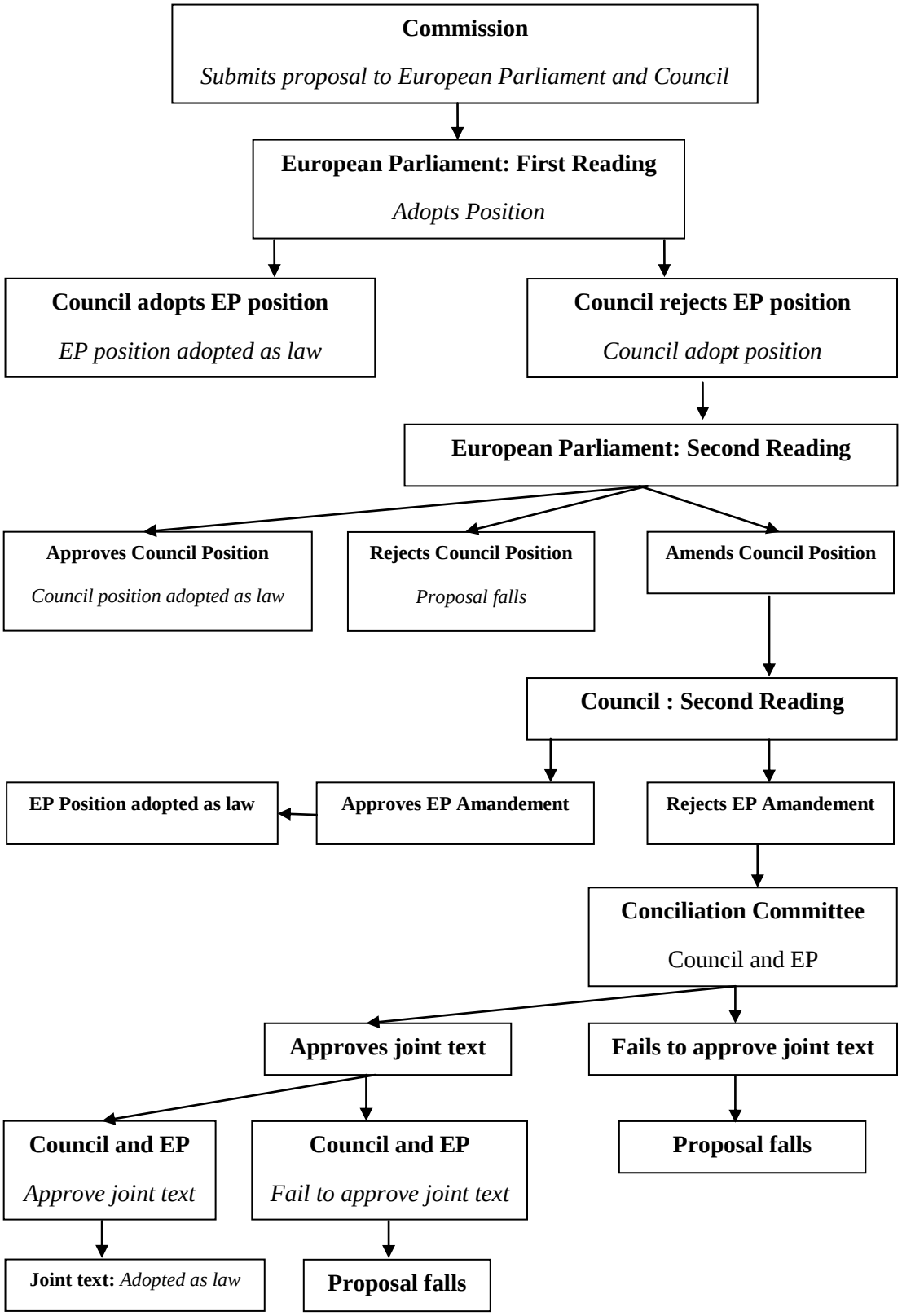

Hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara di kawasan Balkan Barat sebenarnya sudah terjalin sejak runtuhnya Yugoslavia. Balkan Barat menjadi salah satu *concern* bagi Uni Eropa karena Uni Eropa memiliki beberapa kepentingan di kawasan Balkan Barat. Jika Uni Eropa mampu menguasai Balkan Barat dengan menjadikan negara-negara di kawasan Balkan Barat menjadi anggota Uni Eropa, maka tentu posisi Uni Eropa di dunia internasional semakin kuat dan berpengaruh.

Kawasan Balkan Barat menjadi salah satu *concern* Uni Eropa juga dikarenakan oleh kebijakan Uni Eropa sendiri yaitu *EU Enlargement*, dimana 3 tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat integrasi ekonomi antarnegara, merangkul negara-negara di sekitar agar memiliki prinsip sama yaitu demokrasi demi terciptanya stabilitas kawasan, dan Uni Eropa merasa bertanggung jawab untuk membantu negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah untuk bertransformasi menjadi negara demokratis yang makmur.[20]

[20] Neill Nugent, *The Government and Policies of The European Union*, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2003, hlm 499 dalam Panji Noor Hamzah, 2015, Skripsi: *Bergabungnya Kroasia menjadi Anggota Uni Eropa*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 55.